



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl Soeharno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Balai konservasi sumber daya alam
 sum-bar

Diterima Tgl: 5/2-13

No. Surat : s-106 / BICSDA sumbar - 1 / 2013

No. Agenda : 227

Tgl Surat : 25 - 1 - 13

Sifat : -

Perihal - Rekapitulasi Hotspot Thn 2012...

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
- Kas. Supply dan
 pengomun, labakan
 lutan

Disposisi

- Untuk di kirim ke badan terkait
 mengenai tentang center risk
 - Untuk cardus di hutan
 terkait
 - Supaya rencana penerapan, apabila
 terjadi kebakaran

Untuk dibuat laporan

5/2-2013 f

5/2-13



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. 907531 466169 Fax. 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

5

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : BKSDA Sumbang

Diterima Tgl. : 31/01-13

No. Surat : S. 106 / BKSDA Sumbang
1/2013

No. Agenda : 491

Tgl. Surat : 29/01-13

Perihal : Rekapitulasi Hotspot tln 2012 dan kesiapsiagaan
kebakaran hutan dan lahan 2013

Catatan :

Kp Kis Hut
Mak jw. pelantikan
JH 1/2



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT

Jalan Khatib Sulaiman No. 46 Telp./ Fax (0751) 7053343/ 7054136 e-mail kuau@bksda-sumbar.go.id Padang 25137

Nomor : S.106 /BKSDA Sumbar-1/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekapitulasi Hotspot tahun 2012 dan Kesiapsiagaan
Kebakaran Hutan dan lahan 2013

25 Januari 2013

Kepada Yth;
Bupati/Wali Kota
se Sumatera Barat
di -
Tempat

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan jumlah hotspot dan luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2010- 2012, dengan hormat bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan dan UKP4 tahun 2012 bidang pengendalian kebakaran hutan adalah penurunan titik hotspot sebanyak 20% setiap tahun dan penurunan luas kebakaran hutan hingga 50 % dari rerata tahun 2005-2009 di P. Kalimantan, P Sumatera dan P. Sulawesi;
2. Sesuai hasil pemantauan titik hotspot satelit NOAA 18 di Kementerian Kehutanan bahwa di wilayah Provinsi Sumatera Barat pada dekade 3 tahun terakhir pada tahun 2010 – 2012 terindikasi adanya peningkatan jumlah titik hotspot yaitu tahun 2010 : 171 buah, tahun 2011: 546 buah dan pada tahun 2012: 687 buah titik hotspot;
3. Berdasarkan Inpres RI No. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disampaikan kepada 9 Menteri dan 6 Pejabat setingkat Menteri dengan instruksi sebagai berikut yaitu :
 - a. Melakukan peningkatan Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia, melalui kegiatan : pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan.
 - b. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - d. Meningkatkan penegakan hukum dan memberi sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Berkaitan dengan point nomor 1, 2, dan 3 tersebut diatas kami mohon bantuan Bapak kiranya berkenan memberikan himbauan/edaran tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan pada saat kegiatan land clearing pada musim panas pada tahun 2013.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Balai,

Ir. Sahdin Zunaidi, M.Si
NIP.19621124 199403 1 003

Tembusan Kepada Yth;

1. Direktur Jenderal PHKA di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Sekditjen PHKA di Jakarta
4. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan di Jakarta